

# Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelas Bawah

Vici Vadila Putri

Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

\*E-mail: [vicivadilaputri36@gmail.com](mailto:vicivadilaputri36@gmail.com)

## Abstract

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Untuk mendapatkan suatu kesejahteraan masyarakat harus mampu memperbaiki segala sesuatu yang mencangkup seluruh perekonomian kehidupan mereka. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui pendidikan nonformal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Berbagai sumber dianalisis untuk memperoleh simpulan dari penelitian ini. Melalui pelatihan menjahit yang akan diberikan kepada masyarakat kelas bawah, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya menuju masa depan yang lebih baik. Cukup banyak kegiatan pendidikan dan pendidikan yang diselenggarakan baik oleh suatu lembaga yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun yang dilakukan oleh suatu organisasi sendiri sehingga kualitas hasilnya selalu sesuai dengan kebutuhan. tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan kurang relevan dengan kebutuhan mereka. mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan merupakan target dari setiap pendidikan dan pelatihan.

**Keywords:** Training, Welfare Improvement, Lower Class Society



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

## Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendapatkan suatu kesejahteraan masyarakat harus mampu memperbaiki segala sesuatu yang mencangkup seluruh perekonomian kehidupan mereka. Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintahan pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata.

Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana dan prasaran serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat (Humaini, 2018). Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Pemberdayaan terhadap masyarakat bisa dimulai dari keluarga. Gerakan pemberdayaan keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera, berakhlak mulia dan berbudi luhur, maju dan mandiri (Sueb, 2019). Pemberdayaan keluarga khususnya dalam hal mencari nafkah tidak hanya mutlak berada di atas tanggung jawab seorang suami, di zaman sekarang ini istri pun bisa membantu suami dalam rangka memberikan pemasukan tambahan atau bahkan menjadi pokok tulang punggung perekonomian keluarga. Kesejahteraan dan pemahaman keadilan dan kesetaraan gender dalam hal mencari nafkah ini perlu disadarkan terhadap masyarakat di lingkungan yang awam (Panggabean, 2004). Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

Demi kesejahteraan rakyat yang ingin tercapai banyak lembaga yang ingin mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah-bawah tersebut. Dengan diadakannya pelatihan ini masyarakat yang dikhususkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan pada siang harinya agar bias mengikuti proses pelatihan ini, agar hasil yang mereka dapatkan dari pelatihan tersebut bias dijadikan modal awal untuk membangun suatu usaha demi menunjang perekonomian yang lebih baik (Mangkuprawira, 2004).

## **Metode**

Pendekatan berdasar pada kajian tentang Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan. Pengembangan interpersonal dan kelompok digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan tulisan gagasan berbasis pada tahapan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa buku, artikel pada jurnal ilmiah dan jurnal populer dalam media massa. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi yang diteliti. Sumber-sumber kepustakaan ini kemudian menjelaskan tentang Pelatihan sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelas Bawah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Pelatihan**

Pelatihan atau magang adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan.

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini (Sumardjo, 2019). Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan

jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Menurut pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan pelatihan bahwa suatu proses dimana semua peserta pelatihan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang relevan untuk kesejahteraan kehidupannya.

## 2. Aspek-aspek Pelatihan

Aspek potensi, bahwa setiap peserta memiliki potensi-potensi yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-potensi itu antara lain: daya mengingat, daya berfikir, daya berkehendak, daya perasaan, bakat, minat motivasi dan potensi- potensi lain.

Aspek professional vokasional, bahwa setiap pendidikan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dalam bidang teretntu, dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia dapat mengembangkan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal (Aini, 2018).

Aspek fungsional, bahwa seriap peserta melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang garapan yang sesuai pula. Aspek operasional, bahwa setiap peserta dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilan dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya (Dalimunthe, dkk 2022).

Aspek personal, bahwa setiap peserta harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil dari kualitas dan kuantitas.

## 3. Manfaat-manfaat Pelatihan

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktifitas.
- b) Mengurangi waktu waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar
- c) kinerja yang dapat diterima.
- d) Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan.
- e) Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusi.
- f) Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja.
- g) Membantu karyawan dalam peningkatandan pembangunan probadi mereka.

## 4. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus mereka dapatkan, dengan adanya kesejahteraan manusia akan merasakan suatu kelengkapan dalam menjalankan kehidupannya demi mencapai sutua tujuan hidup (Nilasari, 2014). Dengan adanya pelatihan-pelatihan dilingkungan masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, masyarakat akan diajarkan bagaimana cara mengolah dan memasarkan produk yang mereka hasilkan.

Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani (Maspaitella, M. J. & Rahakbauwi, 2014). Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi

pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam lima tahun mendatang perekonomian diupayakan tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun yang diimbangi dengan kebijakan pemerataan dan pemihakan kepada kelompok miskin dan paling rawan terhadap proses pembangunan dengan prioritas pada pengurangan kemiskinan. Kebijakan pertumbuhan ekonomi juga dirancang dengan terus mendorong peranan masyarakat dalam membangun. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan diletakkan pada Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas dan sekaligus Penguatan Daya Saing Industri Manufaktur, serta Revitalisasi Pertanian dalam arti luas (Teja, 2015). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya saing, ketahanan ekonomi nasional, dan memperbesar kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, prioritas pembangunan diberikan pada Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peningkatan Pengelolaan BUMN; Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Di dalam mencapai sasaran tersebut di atas, prioritas pembangunan juga diberikan pada Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro.

Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan yang diberikan pada: Pembangunan Perdesaan, serta Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Dalam kaitan itu keberpihakan pemerintah untuk membangun perdesaan, terutama untuk mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan, serta mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, termasuk wilayah perbatasan ditingkatkan agar perdesaan dan wilayahwilayah tersebut dapat berkembang. Kesenjangan antar wilayah juga dikurangi dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya (Harahap, 2017). Selanjutnya pembangunan perdesaan akan didorong dengan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi perdesaan dengan perkotaan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Untuk itu prioritas pembangunan diletakkan pada: Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas; Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang lebih Berkualitas; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial; Pertumbuhan Penduduk, Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga; serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama (Puspitasari, M. A., & Pratiwi, 2018).

Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Rahmawati, 2019).

Sasaran kelima adalah meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prioritas yang diletakkan pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Shalfiah, 2013).

## **5. Masyarakat Kelas Bawah**

Di Indonesia masih banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah kebawah, mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana mengolah dan pengelola sumber daya yang ada untuk dikembangkan menjadi suatu produk atau barang yang bisa menghasilkan atau meningkatkan perekonomiannya (Rantung, dkk, 2014). Masyarakat kelas bawah merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang kurang memadai yang mana dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Masyarakat kelas bawah pada umumnya memiliki permasalahan yang sama yaitu keterbatasan

pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga sumber daya alam yang ada terbuang sia-sia dan apabila masyarakat mampu memanfaatkannya maka akan terciptalah suatu lapangan pekerjaan yang akan membantu perekonomian masyarakat (Riana, 2014).

Masyarakat kelas bawah membutuhkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh satuan pendidika non formal untuk memberikan informasi-informasi mengenai pemberdayaan sumber daya alam dengan baik, sehingga dengan menata kembali sumber daya yang ada masyarakat akan mengembangkan kembali ide-ide yang pernah terfikirkan tetapi belum pernah tersalurkan.

## Kesimpulan

Jadi kesimpulan dari uraian diatas adalah pelatihan atau lifeskill sangat berperan penting dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat kelas bawah. Dengan adanya pelatihan ini masyarakat kelas bawah bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada.

## Daftar Rujukan

- Aini, M. A. (2018). peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandansari. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2), 779–787.
- Dalimunthe, dkk. (2022). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelatihan Perencanaan Keuangan. *Jurnal Progresif*, 2(2), 30–36. Retrieved from <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/PROGRESIF>
- Harahap, G. (2017). *Koperasi & Pemberdayaan Masyarakat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Humaini, A. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keterampilan Pembuatan Hand Made BerbasisvRumah Tangga. *Jurnal Berdikari*, 6(1).
- Mangkuprawira, S. (2004). *Managemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Maspaitella, M. J. & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Jurnal Aspirasi*, 5(2), 157–164.
- Nilasari, S. (2014). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Panggabean, S. M. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Puspitasari, M. A., & Pratiwi, D. A. (2018). aktor Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 1–16.
- Rahmawati, D. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(2), 79–91.
- Rantung, J., Mandey, J., & Londa, V. (2014). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–11.

- Riana, N. R. (2014). laksanaan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 851–856.
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program Program Pemerintah Kota Bontang. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 976–984.
- Sueb, M. dkk. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemaksimalan Hasil Produksi Rumah Tangga di Wilayah Jatinangor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 121–122.
- Sumardjo. (2019). Sinergi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di Era Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kesejahteraan. In *Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan, Komunikasi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (pp. 32–72). Padang: Universitas Andalas.
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Jurnal Aspirasi*, 6(1), 63–76.